

Harmonisasi Nilai Pendidikan Multikultural dan Keaswajaan di Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren

Romdloni ^{a,1,*}, Dwi Faruqi ^{b,2}, Ade Rosad ^{c,3}, Shinta Hariyani ^{d,4}

^a Universitas Nurul Huda, Indonesia;

^b IAI Insan Prima Misbahul Ulum, Indonesia;

^c Universitas Nurul Huda, Indonesia;

^d Universitas Nurul Huda, Indonesia, Indonesia.

¹romdloni@unuha.ac.id; ²dwifaruqi986@gmail.com; ³ade@unuha.ac.id;

⁴shintaharyani10@gmail.com

*Correspondent Author; romdloni@unuha.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received:

21-07-2026

Revised:

08-09-2026

Accepted:

19-09-2026

Keywords

pendidikan multikultural;
nilai keaswajaan; Tri Dharma
Perguruan Tinggi; perguruan
tinggi berbasis pesantren;
moderasi beragama

ABSTRACT

Perguruan tinggi berbasis pesantren menempati posisi strategis sebagai ruang perjumpaan antara tradisi keilmuan Islam dan tuntutan kehidupan akademik yang plural. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan harmonisasi nilai-nilai pendidikan multikultural (toleransi, kesetaraan, demokrasi, keadilan, dan pluralisme) dengan nilai-nilai keaswajaan (tawassuth, tawazun, i'tidal, dan tasamuh) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Nurul Huda (UNUHA) Sukaraja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas mahasiswa dan dosen yang dipilih secara *purposive*. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahap kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik, perpanjangan pengamatan, serta *member check*. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan pokok. *Pertama*, harmonisasi nilai berlangsung pada tataran konseptual melalui hubungan konvergensi-komplementer: nilai keaswajaan berfungsi sebagai landasan teologis-normatif, sedangkan nilai multikultural berfungsi sebagai kerangka operasional-sosiologis, sehingga keduanya tidak berhadapan secara dikotomis. *Kedua*, harmonisasi terwujud dalam tri dharma dengan penekanan berbeda: dharma pendidikan melalui integrasi nilai pada kurikulum, iklim kelas dialogis, dan keteladanan dosen; dharma penelitian melalui pemilihan topik berbasis kearifan lokal dan etika penelitian yang menjunjung i'tidal; serta dharma pengabdian melalui program lintas kelompok masyarakat yang menegaskan tasamuh dan keadilan sosial. *Ketiga*, harmonisasi menghadapi kendala berupa pemahaman nilai yang belum merata di kalangan dosen, dominasi pendekatan normatif-doktriner pada sebagian mata kuliah, serta belum tersedianya instrumen evaluasi afektif yang terukur. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan

pedoman integrasi nilai lintas dharma sebagai kebijakan institusional.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license.



Introduction

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi, mencakup keragaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Kemajemukan tersebut menyimpan dua kemungkinan yang berlawanan: menjadi modal sosial bagi terbangunnya kohesi kebangsaan, atau justru menjadi sumber ketegangan apabila tidak dikelola melalui proses pendidikan yang memadai. Dalam satu dekade terakhir, sejumlah kajian menunjukkan bahwa isu intoleransi, eksklusivisme beragama, dan polarisasi identitas tidak lagi berhenti di ruang publik, melainkan telah merambah lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi (Kustati et al., 2023; Widiatmaka et al., 2022). Kondisi ini menempatkan institusi pendidikan tinggi bukan sekadar sebagai penghasil lulusan yang kompeten secara akademik, melainkan juga sebagai penjaga daya rekat sosial.

Pendidikan multikultural hadir sebagai salah satu tawaran paradigmatis untuk merespons persoalan tersebut. Sebagai sebuah paradigma, pendidikan multikultural tidak berhenti pada pengakuan atas adanya perbedaan, melainkan menuntut adanya rekonstruksi terhadap kurikulum, relasi kuasa dalam kelas, serta budaya institusi agar setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara tanpa memandang latar belakang kultural dan religiusnya (Banks, 1994; Tilaar, 2004). Dalam konteks Indonesia, kajian meta-analisis yang dilakukan Jayadi, Abduh, dan Basri (Jayadi et al., 2022) menunjukkan bahwa paradigma pendidikan multikultural telah cukup luas diadopsi, namun implementasinya masih banyak berhenti pada level wacana dan belum sepenuhnya menjelma menjadi praktik pedagogis yang sistematis. Temuan serupa dikemukakan Nawangsih et al. (Nawangsih et al., 2022) yang mencatat bahwa pendidikan multikultural di perguruan tinggi kerap dipahami secara sempit sebagai materi ajar, bukan sebagai kultur akademik yang menyeluruh.

Pada saat yang sama, khazanah Islam Indonesia khususnya tradisi *Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah* telah lama memiliki perangkat nilai yang secara substantif bersinggungan dengan gagasan multikulturalisme. Empat prinsip dasar keaswajaan, yaitu *tawassuth* (sikap tengah dan tidak ekstrem), *tawazun* (keseimbangan dalam menimbang berbagai kepentingan), *i'tidal* (tegak lurus pada keadilan), dan *tasamuh* (toleransi terhadap perbedaan), merupakan rumusan etis yang secara historis menjadi pegangan komunitas pesantren dalam berinteraksi dengan keragaman (Hamzah, 2017; Misrawi, 2010). Sejumlah penelitian mutakhir menegaskan bahwa keempat prinsip tersebut memiliki daya jelas yang kuat dalam membentuk karakter moderat peserta didik (Ikhsan et al., 2024; Latif et al., 2023; Leksana et al., 2025). Ibda dkk. (Ibda et al., 2024) bahkan menunjukkan bahwa penguatan kurikulum Aswaja an-Nahdliyah berkontribusi terhadap pencegahan radikalisme keagamaan sejak jenjang pendidikan dasar.

Meskipun demikian, pertemuan antara kedua kerangka nilai ini belum berlangsung tanpa persoalan. Pendidikan multikultural tumbuh dari tradisi intelektual Barat dengan latar perjuangan hak sipil dan kritik terhadap ketimpangan struktural, sehingga sebagian kalangan pesantren memandangnya dengan kecurigaan sebagai gagasan asing yang berpotensi melunturkan keteguhan akidah. Sebaliknya, nilai keaswajaan kadang dipahami secara sempit sebagai penanda identitas organisasi keagamaan semata, sehingga kehilangan daya transformatifnya sebagai etika sosial yang universal. Kekhawatiran timbal

balik inilah yang menjadikan istilah "harmonisasi" relevan: yang dibutuhkan bukan pemilihan salah satu di antara keduanya, melainkan pencarian titik temu yang memungkinkan keduanya saling menopang (Umar et al., 2024; Zakariyah et al., 2022).

Perguruan tinggi berbasis pesantren merupakan lokus yang paling tepat untuk menelaah pertemuan tersebut. Lembaga jenis ini mewarisi tradisi keilmuan, otoritas kiai, dan kultur kepesantrenan, sekaligus terikat pada regulasi pendidikan tinggi nasional yang menuntut pelaksanaan Tri Dharma secara akuntabel. Nasir dan Rijal (Nasir & Rijal, 2021a) menunjukkan bahwa universitas berbasis pesantren memiliki pola khas dalam menanamkan moderasi beragama pada aspek teoretis, praktis, dan ideologis sekaligus. Mustakim et al. (Mustakim et al., 2021) menambahkan bahwa mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam berpotensi diposisikan bukan sekadar sebagai objek pembinaan, melainkan sebagai agen moderasi. Sementara itu, Mukhibat et al. (Mukhibat et al., 2024) menegaskan pentingnya pengembangan kurikulum moderasi beragama yang terevaluasi secara sistematis di pendidikan tinggi, bukan sekadar bersandar pada kegiatan insidental.

Kajian terdahulu, meskipun kaya akan penelitian terkait multikultural, masih menyisakan ruang kosong yang perlu diisi. *Pertama*, sebagian besar penelitian tentang pendidikan multikultural di Indonesia mengambil lokus sekolah dan madrasah, sebagaimana tampak pada kajian Sari, Romdloni, dan Hasan (Sari et al., 2022) yang menelaah pembelajaran Pendidikan Agama Islam berwawasan multikultural dalam menanamkan toleransi beragama siswa, serta kajian Hamdani et al. (Zidan Hamdani et al., 2026), Purba dan Albina (Purba & Albina, 2025), dan Mardatillah dkk. (Mardhatillah et al., 2026). Penelitian pada jenjang pendidikan tinggi, apalagi yang berbasis pesantren, masih relatif terbatas. *Kedua*, penelitian tentang nilai keaswajaan umumnya berhenti pada deskripsi internalisasi nilai dalam pembelajaran atau kegiatan kesantoran, dan belum menempatkannya dalam bingkai Tri Dharma secara utuh (Hana et al., 2023; Masturin, 2023). *Ketiga*, belum banyak penelitian yang secara eksplisit membaca hubungan antara nilai multikultural dan nilai keaswajaan sebagai relasi yang perlu diharmonisasikan, bukan sekadar disandingkan secara paralel.

Universitas Nurul Huda (UNUHA) Sukaraja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dipilih sebagai lokus penelitian karena memenuhi karakteristik yang dibutuhkan. Universitas ini berdiri di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda dan merupakan hasil transformasi kelembagaan dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nurul Huda. Sebagai perguruan tinggi berbasis pesantren yang berafiliasi pada tradisi keaswajaan, UNUHA melayani mahasiswa dengan latar belakang sosial, etnis, dan kultural yang beragam mencakup masyarakat Komering, Jawa transmigran, Bali, Sunda, dan Lampung yang menjadikan kampus ini sebagai ruang perjumpaan lintas kultur dalam pengertian yang sesungguhnya. Dengan demikian, harmonisasi nilai multikultural dan keaswajaan di lembaga ini bukan sekadar persoalan konseptual, melainkan kebutuhan praktis sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan bentuk konvergensi konseptual antara nilai-nilai pendidikan multikultural dan nilai-nilai keaswajaan menurut pemahaman dosen dan mahasiswa; (2) mendeskripsikan wujud harmonisasi kedua kelompok nilai tersebut dalam pelaksanaan dharma pendidikan dan pengajaran, dharma penelitian, serta dharma pengabdian kepada masyarakat; dan (3) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat proses harmonisasi tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian integrasi nilai dalam pendidikan tinggi Islam; secara praktis, temuannya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perumusan kebijakan akademik di perguruan tinggi berbasis pesantren.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemaknaan, praktik, dan pengalaman subjek terhadap proses harmonisasi nilai, sesuatu yang tidak dapat direduksi menjadi angka dan hanya dapat dipahami melalui penelusuran mendalam terhadap konteksnya (Creswell, 2013). Jenis kualitatif deskriptif digunakan karena tujuan penelitian adalah memaparkan fenomena secara apa adanya, sistematis, dan faktual, tanpa maksud menguji hipotesis maupun membangun teori baru yang bersifat formal (Moleong, 2018; Sugiyono, 2020).

Penelitian dilaksanakan di Universitas Nurul Huda (UNUHA) Sukaraja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan latar didasarkan pada pertimbangan bahwa UNUHA merupakan perguruan tinggi berbasis pesantren yang secara formal mengafirmasi nilai keaswajaan dalam visi kelembagaannya, sekaligus menyelenggarakan Tri Dharma dengan komposisi sivitas akademika yang majemuk secara etnis dan kultural.

Subjek penelitian terdiri atas 2 Dosen MK Pendidikan Agama, 2 Dosen MK Keaswajaan dan 9 mahasiswa dari 3 fakultas, yakni Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Sains dan Teknologi. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki keterlibatan langsung dalam mata kuliah tersebut dan pengetahuan memadai mengenai fokus penelitian. Kriteria informan dosen mencakup: (a) mengampu mata kuliah pendidikan agama dan mata kuliah keawajaan; (b) memiliki pengalaman mengajar minimal tiga tahun di UNUHA; dan (c) pernah terlibat dalam kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Kriteria informan mahasiswa mencakup: (a) terdaftar aktif minimal pada semester lima sehingga telah mengalami ketiga dharma secara memadai; (b) berasal dari latar belakang etnis dan kultural yang beragam; serta (c) memiliki pengalaman berorganisasi atau terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan. Penentuan jumlah informan dilakukan secara lentur dengan mengikuti prinsip kejenuhan data (*data saturation*), yaitu penambahan informan dihentikan ketika tidak lagi diperoleh informasi baru yang substansial. Selain dosen dan mahasiswa, pimpinan universitas yakni rektor, wakil rektor, dan dekan dilibatkan sebagai informan pendukung untuk memperoleh konteks kebijakan.

Prosedur pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi partisipatif dilakukan dengan (a) mengamati secara langsung proses perkuliahan MK Pendidikan Agama dan MK Keaswajaan, (b) mengamati kegiatan keagamaan kampus di UNUHA, (c) mengamati forum akademik, (d) serta mengamati interaksi sosial sivitas akademika di ruang-ruang publik kampus UNUHA. Observasi difokuskan pada perilaku yang merepresentasikan nilai toleransi, kesetaraan, demokrasi, keadilan, dan pluralisme, serta manifestasi *tawassuth*, *tawazun*, *i'tidal*, dan *tasamuh*. Hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan.

Wawancara mendalam dilakukan dengan berpedoman pada panduan wawancara yang disusun berdasarkan indikator kedua kelompok nilai yakni nilai multikultural dan nilai keaswajaan, namun tetap membuka ruang bagi pengembangan pertanyaan sesuai dinamika percakapan. Wawancara dengan dosen pengampu difokuskan pada pemahaman nilai, strategi integrasi dalam perkuliahan, orientasi topik penelitian, dan rancangan pengabdian. Wawancara dengan mahasiswa difokuskan pada pengalaman belajar, persepsi terhadap iklim kampus, serta pengalaman berinteraksi dengan perbedaan. Seluruh wawancara direkam atas persetujuan informan dan ditranskripsikan secara verbatim.

Sedangkan dokumen yang ditelaah meliputi dokumen visi-misi universitas, kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), pedoman akademik, laporan penelitian dan

pengabdian dosen, serta dokumentasi kegiatan kemahasiswaan.

Adapun analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (Miles et al., 2013) yang berlangsung secara siklis dan bersamaan dengan proses pengumpulan data, melalui tiga alur kegiatan, yaitu: (a) kondensasi data yaitu proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen dengan melakukan pengodean (*coding*) dengan dua lapis kategori, yakni kategori nilai multikultural (toleransi, kesetaraan, demokrasi, keadilan, pluralisme) dan kategori nilai keaswajaan (*tawassuth*, *tawazun*, *i'tidal*, *tasamuh*), yang kemudian disilangkan dengan kategori dharma (pendidikan, penelitian, pengabdian); (b) penyajian data yaitu penyusunan informasi terkondensasi ke dalam bentuk uraian naratif, matriks silang nilai-dharma, dan bagan hubungan antarkategori sehingga pola harmonisasi dapat terbaca; dan (c) penarikan kesimpulan serta verifikasi yaitu perumusan makna dari pola yang muncul, yang terus diuji ulang terhadap data selama proses berlangsung hingga diperoleh kesimpulan yang kokoh.

Keabsahan data diuji melalui empat cara. *Pertama*, triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari dosen, mahasiswa, dan pimpinan. *Kedua*, triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan isi dokumen. *Ketiga*, perpanjangan pengamatan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan praktik yang berlangsung ajek, bukan peristiwa insidental. *Keempat*, *member check* yaitu mengonfirmasi kembali hasil interpretasi peneliti kepada informan untuk memastikan kesesuaiannya dengan maksud yang mereka sampaikan.

Penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika, meliputi permohonan izin resmi kepada pimpinan universitas, penjelasan tujuan penelitian kepada seluruh informan (*informed consent*), jaminan kerahasiaan identitas melalui penggunaan kode informan, serta hak informan untuk mengundurkan diri pada tahap mana pun tanpa konsekuensi apa pun.

Results and Discussion

1. Konvergensi Konseptual: Keaswajaan sebagai Landasan Teologis, Multikulturalisme sebagai Kerangka Operasional

Temuan pertama penelitian ini menunjukkan bahwa di kalangan dosen dan mahasiswa UNUHA, nilai multikultural dan nilai keaswajaan tidak dipersepsikan sebagai dua hal yang berhadapan, melainkan sebagai dua lapis kerangka yang saling melengkapi. Nilai keaswajaan diposisikan sebagai landasan teologis-normatif yang memberi legitimasi keagamaan, sedangkan nilai multikultural diposisikan sebagai kerangka operasional-sosiologis yang menyediakan perangkat konseptual dan metodologis untuk menerjemahkan nilai tersebut ke dalam praktik pendidikan. Pola relasi tersebut dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 1. Relasi antara Nilai Keaswajaan dan Nilai Multikultural

Nilai Keaswajaan	Nilai Multikultural yang Berkorespondensi	Titik Temu Substantif
<i>Tasamuh</i> (toleransi)	Toleransi, pluralisme	Penerimaan atas keberadaan pihak lain yang berbeda tanpa disertai upaya peniadaan
<i>Tawassuth</i> (moderat)	Pluralisme, demokrasi	Penolakan terhadap posisi ekstrem dan kesediaan menempuh jalan dialog
<i>I'tidal</i> (tegak lurus/adil)	Keadilan, kesetaraan	Perlakuan proporsional tanpa

		diskriminasi berbasis identitas
<i>Tawazun</i> (seimbang)	Kesetaraan, demokrasi	Penimbangan berbagai kepentingan secara berimbang dalam pengambilan keputusan

Yang menarik dari temuan ini adalah adanya pembedaan yang dibuat sendiri oleh para informan antara *tasamuh* dan toleransi dalam pengertian liberal. Bagi sebagian dosen, *tasamuh* dipahami sebagai penghormatan terhadap keberbedaan yang tetap berjangkar pada keteguhan akidah, bukan sebagai relativisme yang menganggap semua keyakinan setara nilai kebenarannya. Pembedaan ini penting karena justru menjadi kunci diterimanya gagasan multikultural di lingkungan pesantren: nilai multikultural tidak masuk sebagai gagasan asing, melainkan sebagai artikulasi kontemporer dari sesuatu yang sudah lama hidup dalam tradisi.

Temuan ini memperkuat argumen Ikhsan dkk. (Ikhsan et al., 2024) mengenai perlunya pembacaan ulang nilai Aswaja an-Nahdliyah sebagai kerangka pendidikan kewargaan, bukan sekadar penanda identitas organisasi. Sejalan dengan itu, Latif dkk. (Latif et al., 2023) menemukan bahwa penanaman nilai Aswaja pada peserta didik efektif memperkuat sikap moderat ketika nilai tersebut dihadirkan dalam bentuk praktik, bukan doktrin hafalan. Subchi dkk. (Subchi et al., 2022) dalam kajian kuantitatifnya juga mencatat bahwa afiliasi pada tradisi keislaman moderat berkorelasi positif dengan sikap terbuka terhadap keberagaman. Dengan demikian, konvergensi konseptual yang ditemukan di UNUHA bukan merupakan kekhasan lokal semata, melainkan pola yang konsisten dengan temuan pada konteks lain.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa konvergensi ini tidak bersifat sempurna. Terdapat wilayah yang tidak sepenuhnya tertutupi oleh nilai keaswajaan, khususnya dimensi kritis dari pendidikan multikultural yang menyoroti ketimpangan struktural, misalnya ketimpangan gender, kelas ekonomi, dan akses terhadap sumber daya pendidikan. Banks (Banks, 1994) menempatkan dimensi ini sebagai inti dari pendidikan multikultural, yakni *equity pedagogy* dan *empowering school culture*. Di lingkungan yang diteliti, dimensi ini belum banyak mendapat penekanan, sehingga harmonisasi yang berlangsung cenderung kuat pada aspek harmoni sosial dan relatif lemah pada aspek kritik struktural. Temuan serupa dilaporkan Jayadi et al. (Jayadi et al., 2022) yang mencatat kecenderungan pendidikan multikultural di Indonesia lebih menekankan kerukunan daripada keadilan struktural.

2. Harmonisasi dalam Dharma Pendidikan dan Pengajaran

Dharma pendidikan merupakan ruang di mana harmonisasi nilai berlangsung paling intensif. Penelitian menemukan tiga jalur utama.

a. Jalur kurikulum

Nilai keaswajaan dihadirkan secara eksplisit melalui mata kuliah institusional bermuatan ke-Aswaja-an dan ke-NU-an, sementara nilai multikultural hadir secara tersebar (*infused*) dalam berbagai mata kuliah, terutama pada rumpun kependidikan dan keislaman. Pola ini menunjukkan bahwa integrasi nilai tidak diselenggarakan melalui satu mata kuliah tunggal, melainkan melalui strategi ganda: penguatan eksplisit pada mata kuliah khusus dan penyisipan implisit pada mata kuliah lain. Strategi ini sejalan dengan rekomendasi Mukhibat dkk. (Mukhibat et al., 2024) yang menekankan perlunya kurikulum moderasi yang terdistribusi dan terevaluasi, bukan terisolasi pada satu mata kuliah.

Meskipun demikian, telaah dokumen RPS menunjukkan bahwa penyisipan nilai multikultural pada sebagian besar mata kuliah belum terumuskan secara eksplisit dalam capaian pembelajaran. Nilai tersebut lebih banyak hidup dalam praktik dosen di kelas

daripada tercantum dalam dokumen perencanaan. Kondisi ini menjadikan keberlangsungannya sangat bergantung pada komitmen individual dosen dan rentan terputus ketika terjadi pergantian pengampu.

b. Jalur iklim pembelajaran

Harmonisasi paling kentara terlihat pada metode pembelajaran yang dipakai. Dosen secara konsisten membuka ruang diskusi, menghargai perbedaan pendapat mahasiswa, dan menghindari pemutlakan satu pandangan pada persoalan-persoalan khilafiyah. Praktik menghadirkan beragam pendapat mazhab dalam pembahasan persoalan fikih, misalnya, merupakan perwujudan simultan dari *tawassuth* (tidak memutlakan satu posisi), *tasamuh* (menghargai pendapat yang berbeda), dan nilai demokrasi serta pluralisme dalam kerangka multikultural. Mahasiswa mempersepsikan praktik ini sebagai pengalaman belajar yang membebaskan sekaligus tetap terarah.

Hal ini menguatkan temuan Mustakim dkk. (Mustakim et al., 2021) bahwa mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam dapat diposisikan sebagai agen moderasi apabila iklim akademik yang dibangun memungkinkan mereka berlatih berbeda pendapat secara beradab. Ibrahim dkk. (Ibrahim et al., 2023) bahkan menemukan adanya keterkaitan antara sikap moderat dan capaian akademik mahasiswa di perguruan tinggi Islam, yang mengindikasikan bahwa keterbukaan terhadap perbedaan tidak berbanding terbalik dengan ketekunan akademik.

c. Jalur keteladanan dan kultur kampus

Dosen, khususnya yang sekaligus berperan sebagai pengasuh atau ustaz di lingkungan pesantren, menjadi rujukan perilaku bagi mahasiswa. Sikap *i'tidal* tampak dalam pemberian nilai yang tidak memandang latar belakang mahasiswa, sedangkan *tawazun* tampak dalam upaya menyeimbangkan tuntutan akademik dengan kewajiban kepesantrenan bagi mahasiswa yang sekaligus berstatus santri. Praktik ini menunjukkan bahwa di perguruan tinggi berbasis pesantren, kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) berperan sekurang-kurangnya sama besar dengan kurikulum formal, temuan yang konsisten dengan kajian Nasir dan Rijal (Nasir & Rijal, 2021) mengenai pola penanaman moderasi pada universitas berbasis pesantren.

3. Harmonisasi dalam Dharma Penelitian

Dibandingkan dharma pendidikan, harmonisasi nilai dalam dharma penelitian berlangsung lebih lemah dan belum terpolakan secara sistematis. Penelitian menemukan dua bentuk manifestasi.

Pertama, pada tataran pemilihan topik. Sebagian penelitian dosen dan tugas akhir mahasiswa mengangkat tema kearifan lokal, tradisi keagamaan masyarakat setempat, dan relasi antarkelompok di wilayah Ogan Komering Ulu Timur yang secara demografis memang majemuk. Pemilihan topik semacam ini merupakan wujud pengakuan terhadap pluralisme, sekaligus perwujudan *tawassuth* karena menempatkan tradisi lokal sebagai objek kajian yang sah dan bernilai, bukan sebagai sesuatu yang harus dihakimi.

Kedua, pada tataran etika penelitian. Nilai *i'tidal* terwujud dalam komitmen menyajikan data secara jujur dan menghindari pemihakan yang tidak berdasar, sedangkan *tawazun* terwujud dalam upaya memberikan porsi yang berimbang kepada berbagai sudut pandang informan.

Namun demikian, sebagian besar dosen mengakui bahwa integrasi nilai dalam penelitian belum menjadi pertimbangan sadar, melainkan berlangsung secara intuitif. Belum terdapat peta jalan penelitian institusional (*research roadmap*) yang secara eksplisit

menempatkan harmonisasi nilai multikultural dan keaswajaan sebagai salah satu tema payung. Akibatnya, penelitian dengan tema ini muncul secara sporadis dan bergantung pada minat individual peneliti. Kesenjangan ini sejalan dengan temuan bibliometrik Muksin dan Afandi (Muksin & Afandi, 2023) yang mencatat bahwa kajian moderasi beragama di lingkungan ma'had dan pesantren perguruan tinggi masih terkonsentrasi pada aspek pembelajaran dan belum banyak menyentuh dimensi kelembagaan yang lain.

4. Harmonisasi dalam Dharma Pengabdian kepada Masyarakat

Dharma pengabdian menjadi ruang di mana nilai-nilai yang dipelajari di kelas diuji dalam interaksi nyata dengan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa program pengabdian, baik yang berbentuk Kuliah Kerja Nyata mahasiswa maupun pengabdian dosen dilaksanakan di desa-desa dengan komposisi penduduk yang beragam secara etnis dan pada sebagian lokasi beragam secara keagamaan. Beberapa bentuk harmonisasi yang teridentifikasi adalah:

- a. Penempatan lokasi lintas kultur. Mahasiswa ditempatkan di wilayah dengan komposisi penduduk yang berbeda dari latar belakang asalnya, sehingga mereka berlatih berinteraksi dengan perbedaan secara langsung. Ini merupakan perwujudan *tasamuh* dan pluralisme sekaligus.
- b. Program yang bersifat inklusif. Kegiatan pemberdayaan seperti pendampingan literasi, penguatan ekonomi rumah tangga, dan penyuluhan kesehatan dirancang untuk menjangkau seluruh warga tanpa membedakan latar belakang. Prinsip ini merupakan perwujudan *i'tidal* dan nilai keadilan.
- c. Pendekatan dialogis dalam perancangan program. Program disusun melalui musyawarah dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat, bukan ditentukan sepihak oleh kampus. Praktik ini merupakan perwujudan nilai demokrasi sekaligus *tawazun*.
- d. Sikap akomodatif terhadap tradisi lokal. Mahasiswa diarahkan untuk tidak mempersoalkan praktik keagamaan masyarakat yang berbeda dari kebiasaannya, melainkan menempatkan diri sebagai pembelajar. Sikap ini merupakan perwujudan *tawassuth* yang paling nyata di lapangan.

Temuan ini memperkuat kajian Saddam dan Eki (Husain & Wahyuni, 2021) serta Zakariyah dkk. (Zakariyah et al., 2022) yang menunjukkan bahwa tradisi pesantren menyediakan modal kultural yang efektif bagi penguatan moderasi beragama di tengah masyarakat. Danial dkk. (Danial et al., 2021) juga menegaskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi Islam yang mampu menjembatani tradisi keilmuan dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Umar dkk. (Umar et al., 2024) mencatat bahwa transformasi karakter moderat menjadi paling efektif ketika peserta didik berhadapan langsung dengan keberagaman, bukan sekadar membacanya dalam teks.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat

Temuan di lapangan menunjukkan adanya sejumlah kondisi yang secara tidak langsung memberikan ruang bagi tumbuhnya nilai-nilai keaswajaan dan multikultural. Di sisi lain, masih terdapat beberapa persoalan yang menyebabkan proses tersebut belum berlangsung secara optimal dan merata. Kondisi yang beragam tersebut menunjukkan bahwa penanaman nilai multikultural merupakan proses yang bersifat kompleks dan membutuhkan dukungan dari berbagai unsur, baik pada tingkat individu, budaya akademik, maupun kebijakan institusional. Berdasarkan kondisi tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi proses penanaman nilai dapat dipetakan ke dalam faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai berikut.

Faktor pendukungnya adalah *pertama*, afiliasi kelembagaan pada tradisi keaswajaan memberikan legitimasi teologis yang kuat, sehingga penanaman nilai moderat tidak dipersepsikan sebagai agenda dari luar. *Kedua*, kultur pesantren yang menempatkan adab

dan penghormatan kepada guru sebagai nilai utama menciptakan iklim sosial yang relatif kondusif bagi penyelesaian perbedaan secara damai. *Ketiga*, keragaman latar belakang mahasiswa menyediakan laboratorium sosial alamiah bagi praktik nilai multikultural. *Keempat*, keteladanan pimpinan dan dosen senior berfungsi sebagai penguat yang efektif.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah *pertama*, pemahaman terhadap nilai multikultural belum merata di kalangan dosen; sebagian masih memaknainya secara sempit sebagai toleransi antaragama saja, tanpa menyentuh dimensi kesetaraan dan keadilan struktural. *Kedua*, sebagian mata kuliah keislaman masih disampaikan dengan pendekatan normatif-doktriner yang kurang membuka ruang bagi perbandingan pandangan. *Ketiga*, belum tersedia instrumen evaluasi afektif yang terukur untuk menilai perubahan sikap mahasiswa, sehingga keberhasilan penanaman nilai lebih banyak disimpulkan dari kesan umum daripada dari bukti yang terdokumentasi. *Keempat*, integrasi nilai belum tertuang dalam dokumen kebijakan akademik yang mengikat lintas dharma, sehingga bergantung pada inisiatif individual.

Hambatan ketiga dan keempat merupakan persoalan yang paling mendasar. Mukhibat dkk. (Mukhibat et al., 2024) menegaskan bahwa kurikulum moderasi beragama di pendidikan tinggi hanya dapat dinilai efektif apabila disertai perangkat evaluasi yang memadai. Tanpa itu, penanaman nilai berisiko berhenti sebagai retorika institusional. Nawangsih dkk. (Nawangsih et al., 2022) mencatat persoalan serupa pada konteks perguruan tinggi lain, yang menunjukkan bahwa ini merupakan tantangan struktural pendidikan multikultural di Indonesia, bukan kelemahan satu lembaga semata.

6. Sintesis: Model Harmonisasi Berlapis

Dari keseluruhan temuan, harmonisasi nilai multikultural dan keaswajaan di perguruan tinggi berbasis pesantren dapat dirumuskan sebagai model berlapis yang terdiri atas empat tingkat:

- Lapis teologis-normatif – nilai keaswajaan menyediakan dasar keagamaan yang menjadikan sikap moderat dan toleran sebagai tuntutan ajaran, bukan sekadar pilihan pragmatis.
- Lapis konseptual-akademik – nilai multikultural menyediakan perbendaharaan konsep dan kerangka analisis untuk memahami keberagaman secara sistematis.
- Lapis institusional – kebijakan kampus, kurikulum, dan struktur kegiatan menerjemahkan kedua kerangka nilai tersebut ke dalam bentuk yang terlembaga.
- Lapis praksis – perilaku nyata dosen dan mahasiswa dalam ketiga dharma menjadi wujud akhir sekaligus ujian bagi ketiga lapis sebelumnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa lapis pertama, kedua, dan keempat telah berjalan relatif baik di UNUHA, sedangkan lapis ketiga, lapis institusional – merupakan mata rantai yang paling lemah. Penguatan pada lapis inilah yang menjadi kebutuhan paling mendesak agar harmonisasi nilai tidak bergantung pada figur, melainkan terjamin oleh sistem.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal berikut. *Pertama*, nilai-nilai pendidikan multikultural dan nilai-nilai keaswajaan di Universitas Nurul Huda berada dalam hubungan konvergensi-komplementer, bukan hubungan yang saling menegasikan. Nilai keaswajaan (*tawassuth*, *tawazun*, *i'tidal*, *tasamuh*) berperan sebagai landasan teologis-normatif yang memberikan legitimasi keagamaan, sementara nilai multikultural (toleransi, kesetaraan, demokrasi, keadilan, pluralisme) berperan sebagai kerangka operasional-sosiologis yang menyediakan perangkat konseptual untuk menerjemahkan nilai tersebut ke dalam praktik akademik. Korespondensi paling kuat

terjadi antara *tasamuh* dengan toleransi dan pluralisme, serta antara *i'tidal* dengan keadilan dan kesetaraan.

Kedua, harmonisasi kedua kelompok nilai terwujud dalam ketiga dharma dengan intensitas yang berbeda-beda. Dharma pendidikan dan pengajaran menjadi ruang harmonisasi yang paling intensif, melalui jalur kurikuler, iklim pembelajaran yang dialogis, dan keteladanan dosen. Dharma pengabdian kepada masyarakat menjadi ruang pengujian nilai yang paling nyata, melalui penempatan lintas kultur, program yang inklusif, dan pendekatan dialogis dengan masyarakat. Sementara itu, dharma penelitian merupakan ruang dengan tingkat harmonisasi yang paling lemah, karena integrasi nilai masih berlangsung secara intuitif dan belum ditopang peta jalan penelitian institusional.

Ketiga, proses harmonisasi ditopang oleh afiliasi kelembagaan pada tradisi keaswajaan, kultur pesantren yang mengutamakan adab, keragaman latar belakang mahasiswa, dan keteladanan pimpinan. Sebaliknya, proses tersebut terhambat oleh pemahaman nilai multikultural yang belum merata di kalangan dosen, pendekatan normatif-doktriner pada sebagian mata kuliah, ketiadaan instrumen evaluasi afektif yang terukur, serta belum adanya kebijakan akademik yang mengikat integrasi nilai lintas dharma.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pimpinan perguruan tinggi berbasis pesantren menyusun pedoman integrasi nilai lintas dharma sebagai dokumen kebijakan resmi, merumuskan capaian pembelajaran bermuatan nilai multikultural dan keaswajaan secara eksplisit dalam RPS, mengembangkan instrumen penilaian afektif yang terukur, serta menetapkan harmonisasi nilai sebagai salah satu tema payung dalam peta jalan penelitian dan pengabdian institusional. Penelitian lanjutan disarankan untuk menempuh desain multisitus pada beberapa perguruan tinggi berbasis pesantren, atau menempuh pendekatan kuantitatif guna mengukur efektivitas harmonisasi nilai terhadap sikap toleransi mahasiswa secara empiris.

References

- Banks, J. A. (1994). *An Introduction to Multicultural Education*. Allyn and Bacon.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed). SAGE Publications.
- Danial, Dewi, N. S., & Kafrawi. (2021). The Development Model of Human Resources at Islamic Universities in Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 9(1), 103–122. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i1.450>
- Hamzah, M. (2017). *Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah* (Cetakan 1). LKiS.
- Hana, M. Y., Mahmud, M. E., & Ridani, A. (2023). Internalisasi Nilai Ahlussunnah Waljama'ah An-Nahdliyyah dalam Penguatan Moderasi Beragama Pada Pondok Pesantren. *Borneo Journal of Islamic Education*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/bjie.v3i2.8512>
- Husain, S., & Wahyuni, A. E. D. (2021). Moderasi Beragama Berbasis Tradisi Pesantren pada Ma'had Aly As'adiyah Sengkang Wajo Sulawesi Selatan. *Harmoni*, 20(1), 48–66. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.455>
- Ibda, H., Wijanarko, A. G., Azizah, F. N., Amnillah, M., & Ro'uf, A. (2024). Islamic Moderation in Elementary School: Strengthening the Aswaja Annadhliyah Curriculum in Preventing Religious Radicalism. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 18(4), 1246–1253. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v18i4.21821>
- Ibrahim, R., Rifa'i, A. A., Triana, Y., Supriyanto, Haryanto, S., & Mukhlisin, A. (2023). The Correlation Between Attitude Toward Religious Moderation and Academic Achievement of Islamic Higher Education Students. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 23(18). <https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i18.6621>

- Ikhsan, M. A., Marzuki, M., Universitas Negeri Yogyakarta Indonesia, Suharno, S., Universitas Negeri Yogyakarta Indonesia, Khoirul Anam, F., Universitas Negeri Malang Indonesia, Muzdalifah, Z., STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang Indonesia, Arawindha, U., & Universiti Kebangsaan Malaysia. (2024). The New Concept of Aswaja An-Nahdliyah Values: An Investigation of Religious Moderation and Citizenship Teaching in Pesantren-Integrated Schools. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 8(2), 123-135. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2024.008.02.1>
- Jayadi, K., Abduh, A., & Basri, M. (2022). A Meta-Analysis of Multicultural Education Paradigm in Indonesia. *Heliyon*, 8(1), e08828. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08828>
- Kustati, M., Indra, R., Efendi, Ritonga, M., Nelmawarni, Yulia, & Karni, A. (2023). The Effect of National Insight and Religious Moderation on Radical Behavior of Secondary School Students. *Education Research International*, 2023(1), 1-13. <https://doi.org/10.1155/2023/2919611>
- Latif, A., Ubaidillah, & Mundir. (2023). Embedding Aswaja Values in Strengthening Religious Moderation in Students. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(3), 601-609. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i3.521>
- Leksana, D. M., Naqiyah, N., Khusumadewi, A., & Kurniawan, S. (2025). The Integration of Aswaja NU Values and Kohlberg's Theory as the Foundation of Early Childhood Moral Education in Indonesia: A Conceptual Study. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 16(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jpka.v16i1.90724>
- Mardhatillah, R., Diantoro, F., Wulandari, A. D., Anisa, H., & Wulandari, P. (2026). Peran Pendidikan Islam Multikultural dalam Membangun Toleransi di Sekolah dan Madrasah. *Ajer: Advanced Journal of Education and Religion*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/ajer.v3i2.13090>
- Masturin. (2023). Development of Islamic Religious Education Materials Based on Religious Moderation in Forming Student Character. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(4), 246-355. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v3i4.310>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Misrawi, Z. (2010). *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan*. Kompas.
- Moleong, L. J. (2018). *Metologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukhibat, M., Effendi, M., Setyawan, W. H., & Sutoyo, M. (2024). Development and Evaluation of Religious Moderation Education Curriculum at Higher Education in Indonesia. *Cogent Education*, 11(1), 2302308. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2302308>
- Muksin, M., & Afandi, A. (2023). Tren Penelitian Tentang Moderasi Beragama di Ma'had Jami'ah dan Pesantren Perguruan Tinggi: Studi Bibliometrik. *Journal of Education Research*, 4(4), 2638-2645. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.1421>
- Mustakim, Z., Ali, F., & Kamal, R. (2021). Empowering Students as Agents of Religious Moderation in Islamic Higher Education Institutions. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 65-76. <https://doi.org/10.15575/jpi.v7i1.12333>
- Nasir, M., & Rijal, M. K. (2021a). Keeping the Middle Path: Mainstreaming Religious Moderation Through Islamic Higher Education Institutions in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 213-241. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.213-241>
- Nasir, M., & Rijal, M. K. (2021b). Keeping the middle path: Mainstreaming religious moderation through Islamic higher education institutions in Indonesia. *Indonesian*

- Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 213–241.
<https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.213-241>
- Nawangsih, E., Sabarudin, S., Daheri, M., & Eviliani, E. (2022). Pendidikan Multikultural di Perguruan Tinggi. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5727–5733.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3378>
- Purba, F. A., & Albina, M. (2025). Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural di Sekolah/Madrasah. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2). <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3042>
- Sari, I. A. R., Romdloni, & Hasan, S. (2022). Pendidikan Agama Islam Berwasasan Multikultural Dalam Menanamkan Toleransi Beragama Siswa. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 35–41. <https://doi.org/10.30599/jpia.v9i1.1466>
- Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). Religious Moderation in Indonesian Muslims. *Religions*, 13(5), 451. <https://doi.org/10.3390/rel13050451>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Grasindo.
- Umar, M., Ismail, F., Rahmi, S., & Arifin, Z. (2024). Transforming of Moderate Character Education in Islamic Educational Institutions. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 171–188. <https://doi.org/10.31538/nzh.v7i1.4168>
- Widiatmaka, P., Hidayat, M. Y., Yapandi, & Rahnang. (2022). Pendidikan Multikultural dan Pembangunan Karakter Toleransi. *JIPSINDO (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia)*, 09(02). <https://doi.org/10.21831/jipsindo.v9i2.48526>
- Zakariyah, Z., Fauziyah, U., & Nur Kholis, M. M. (2022). Strengthening the Value of Religious Moderation in Islamic Boarding Schools. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 3(1), 20–39. <https://doi.org/10.31538/tijie.v3i1.104>
- Zidan Hamdani, A., Abdullah, M. B., & Luqna Hunaida, W. (2026). Peran Guru PAI dalam Pembelajaran Multikultural: Membangun Kesadaran Toleransi Antarumat Beragama di Sekolah. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 78–91.
<https://doi.org/10.31538/adrg.v6i1.2735>